

- Untuk mengatasi masalah pemadaman listrik pihak LPSE Kabupaten Kerinci mengadakan penambahan UPS dan menyediakan *genset* yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
- Untuk mengatasi gangguan jaringan internet pihak LPSE Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan PT. Telkom dan membuat Berita Acara Kerusakan Jaringan dan diumumkan melalui LPSE
- Pada saat ini telah dipasang kabel *Fiber Optik* (FO) oleh pihak Telkom, Untuk tahun 2017 akan diupayakan penambahan *bandwith* jaringan internet.
- Untuk kedepannya akan dilakukan penataan ruangan dan penambahan ruangan sehingga sesuai dengan peraturan LKPP

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil temuan penelitian terhadap Kajian pelaksanaan tender setelah pemanfaatan *e-Procurement* pada proyek konstruksi di Kabupaten Kerinci dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **5.1.3 Permasalahan Pelaksanaan Tender Setelah Dimanfaatkannya *e-Procurement* pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Kerinci**

##### **1. Faktor Prosedur**

Pelaksanaan tender *e-Procurement* dihadapkan pada masalah aplikasi yaitu perbaikan versi SPSE yang disertai dengan revisi SOP yang tidak dipahami oleh

penyedia, kemudian masalah agregasi perusahaan, tugas *Verifikator* dan *helpdesk* dirangkap oleh Admin sistem, masalah persyaratan pendaftaran dan rumitnya proses *e-Procurement* yang disampaikan oleh penyedia, adanya kecurigaan dari penyedia bahwa tender *e-Procurement* bisa diatur dan kemungkinan penyalahgunaan *UserID* dan *Password*.

## **2. Faktor Sumber daya Manusia**

Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang tidak sesuai dengan Peraturan LKPP yaitu tidak adanya unit layanan pengguna (*Helpdesk*) hal ini disebabkan oleh kekurangan SDM yang terlatih dan berkualitas, kemudian satu personil yang melakukan banyak aktifitas hak akses, hal ini menunjukkan masih lemahnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi penyedia yang belum memahami *e-Procurement* sehingga mempekerjakan operator untuk *e-Procurement*.

## **3. Faktor Teknologi**

Dari faktor teknologi dan infrastruktur LPSE Kabupaten Kerinci dihadapkan pada masalah jaringan internet yang tidak stabil, masalah *server* yang *error* serta listrik yang sering mati, walaupun sifatnya sementara tetapi menghambat kelancaran proses tender. Kemudian masalah sarana dan prasarana yang semua kegiatan masih dalam satu ruangan.

### **5.1.4 Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi**

#### **permasalahan pelaksanaan e-Procurement**

Kendala pelaksanaan operasional kegiatan *e-Procurement* tidak terlepas dari masalah regulasi dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menyelesaikan masalah tersebut diinternal LPSE, kemudian bila diperlukan

akan berkoordinasi dengan LKPP di Jakarta. Kemudian mengusulkan tambahan pegawai untuk LPSE ke BKD serta mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan. Selanjutnya penambahan dan peningkatan teknologi serta peralatan untuk LPSE, kemudian mengupayakan penataan dan penambahan sarana dan prasarana untuk LPSE Kabupaten Kerinci.

## 5.2 Saran

1. Harus meningkatkan komitmen *top manager*, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel, serta komitmen untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Berkoordinasi dengan LKPP mengenai regulasi dan peraturan agar LPSE Kabupaten Kerinci selalu dalam kondisi ideal dalam hal pelayanan kepada pengguna, serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengikuti SOP yang berlaku.
3. Untuk mengatasi permasalahan dari kurang idealnya teknologi, infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia, sangat disarankan pada Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan peningkatan kapasitas LPSE yang masih melekat pada Bagian PDE Setda Kerinci untuk membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru khusus untuk LPSE.
4. Adanya OPD baru tersebut juga bisa mengatasi masalah regulasi dan masalah anggaran, yang mana adanya OPD baru sudah pasti mempunyai regulasi dan anggaran sendiri yang terpisah dari anggaran Sekretariat Daerah.